



Modul Pembelajaran Mata Kuliah

PENGANTAR HUKUM SIBER

Dr. Awaludin Marwan, S.H.,M.H.



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

Kata Pengantar

Modul ini disusun sebagai bahan ajar dari mata kuliah hukum siber. Hukum Siber adalah sebuah rejim studi hukum yang mempelajari bagaimana interkoneksi regulasi dan perkembangan teknologi digital dengan pendekatan multidisipliner yang membahas mulai dari persoalan norma hukum, praktik seorang legal counsel perusahaan teknologi digital, riset-riset fundamental di bidang hukum teknologi digital dan seterusnya.

Melalui mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu mengenal dan memahami serta menggunakan kajian filsafat hukum dan teori hukum untuk membedah dan menganalisis kasus hukum siber. Mahasiswa juga diharapkan bisa menganalisis dan menguraikan bedah regulasi dan kasus yang berkaitan dengan hukum dan teknologi digital.

Selanjutnya, kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang contoh-contoh pemrosesan data pribadi untuk instansi maupun korporasi. Pada saat bersamaan, mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang pemrosesan data pribadi dan kebijakan serta penerapannya di perusahaan.

Berkenaan dengan perusahaan startup teknologi, diharapkan mahasiswa mampu mengenal dan memahami peran dan tugas legal counsel dalam sebuah perusahaan startup teknologi. Mahasiswa mampu mengenal dan memahami cara menyusun kontrak, penyusunan AD/ART dan pengesahan pembuatan perseroan terbatas dan mekanisme pendaftaran merek.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas arahan dan dukungannya sehingga buku ajar ini bisa disusun dan dipergunakan untuk mendukung pengajaran terhadap mahasiswa.

Salam

Bekasi, 2 Maret 2023



Materi Hukum Siber



Filsafat Hukum Masa Depan



Keamanan Siber dan Kejahatan Siber



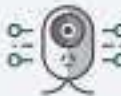
Pelindungan Data Pribadi



Kecerdasan Artifisial



Start-up Law Kit



Venture Capital Tech Law Studies



Filsafat Hukum Masa Depan

"The Internet produced the innovation and growth that it has enjoyed."

- Lawrence Lessig -
Code and other laws of cyberspace
2006



"There is no ground for drawing visionary inferences from what has just been stated, to the presentiment of a future life and invisible relations to departed souls."

- Immanuel Kant -
The Philosophy of Law:
Fundamental Principles of Jurisprudence as The Science of Right
1887





Potensi Ekonomi Digital yang Besar



https://services.google.com/fh/files/misc/economy_sea_2021_report.pdf



Potensi Pertumbuhan Internet Indonesia



<https://tekno.kompas.com/read/2022/02/24/07020097> | [pengguna-in-ternet-indonesia- tambah-350-juta-tampt](#) | [-asrusa-civilis-dari-pasal](#)



Tantangan Hukum Siber



<https://haki.co.kompas.com/read/2021/02/24/07000007> /pengguna-informasi-indonesia-familia-30-juta-hamp /e-pemeran-online-diri-penal



Anatomi Hukum Siber

Tekno Sains

- Virtual Reality
- Artificial Intelligence
- Blockchain
- 5G
- 3D Printing
- Cloud Computing
- Internet of Things
- Bio-Technology
- Augmented Reality
- Quantum Computing

Ragam Studi Hukum

- Hukum Pidana
- Hukum Tata Negara
- Pajak
- Perdata
- Hukum Perusahaan
- Hukum Pajak
- Perizinan
- Hak Kekayaan Intelektual
- Ketenagakerjaan
- Compliance

Sektoral (*use-case*)

- Pendidikan
- Hukum
- Perbankan
- Perdagangan
- Kesehatan
- Pemerintahan (e-gov)
- Pertanian
- Pariwisata
- Transportasi
- Politik



Peluang Karir Sarjana Hukum

Bidang Teknologi



Hukum Pelindungan Data Pribadi



Per hari: 7 juta kebocoran data. **Per detik:** 58 kasus. **Per jam:** 210.000 kasus. **Per tahun:** 2.55 milyar kebocoran data. (Veronis: 2020).



Kerugian akibat kebocoran data, rata-rata men capai **\$3.86 juta** . (The Global Cost a Data Breach Report-IBM: 2018).



16.000 laporan pada cekrekening.id, **14.000 penipuan online** . (2018).



Privacy Data Life-Cycle

Badan Publik

Korporasi

● Pemerolehan dan pengumpulan	● Perintah Undang-Undang & Persetujuan	● Persetujuan Subjek Data
● Pengolahan dan penganalisisan	● Sama	● Sama
● Penyimpanan	● Dalam negeri (kecuali sektor keuangan)	● Dalam negeri atau luar negeri
● Perbaikan dan pembaharuan	● Sama	● Sama
● Penampilan, pengumuman, dan penyebaran	● Sama	● Sama
● Transfer	● Sama	● Sama
● Penghapusan atau pemusnahan	● UU Arsip Negara	● 5 (lima) Tahun Perkominfo No. 20 Tahun 2016 (Bacalah: sebelum adanya PP)



Pejabat atau petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi



Menginformasikan dan memberikan saran kepatuhan pelindungan data pribadi.



Memantau dan memastikan kepatuhan pelindungan data pribadi.



Memberikan saran mengenai penilaian dampak privasi.



Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.



Startup Builder Kit





Legal Aspect



Legal Entity/License



Contract



Intellectual Property Right



Kejahatan Siber



- Pasal 27 ayat 1 Kesusilaan
- Pasal 27 ayat 2 Perjudian
- Pasal 27 ayat 3 Pencemaran Nama Baik
- Pasal 27 ayat 4 pengancaman
- Pasal 28 ayat 1 Berita Bohong merugikan konsumen
- Pasal 28 ayat 2 Rasisme dan Penistaan Agama
- Pasal 29 Ancaman Kekerasan
- Pasal 30 Akses ilegal [digital]
- Pasal 31 Penyadapan ilegal [digital]
- Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Pengrusakan & Peretasan [digital] UU ITE



Keamanan Siber



Malware (Ransomware), Social Engineering, Password Cracking, Carding, Hacking, DDoS, Man in the middle, Remote Code Execution, Remote Access Trojan, etc.



Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.



SEOJK 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.



NIST Cybersecurity Framework.



Harry Surden : Professor of Law at the University of Colorado Law School



Teknik 1

Rules, Logic and Knowledge Representation Approach
– model & otomatisasi

Teknik 2

Machine Learning Approach
– self programming





Tentang AI



Google — Alphabet & Google Assistant
Facebook — Facebook AI
Microsoft — Cortana
Amazon — Alexa
Apple — Siri



- prosa.ai
- kata.ai
- bahasa.ai
- nodeflu x.ai
- widya.ai



Yuvah Noah Harari — Catur 1996 Deep Blue IBM vs Garry Kasparov
David Cope — Professor University of California Experiments in Musical Intelligence memainkan John Sebastian Bach



Eropa



Ethics Guidelines for Trustworthy AI:
lawful AI & ethical AI.



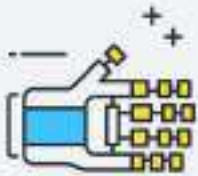
Proposal untuk harmonisasi
peraturan untuk kecerdasan artifisial
High risk AI, kesehatan, keamanan dan
pemenuhan hak fundamental.



White Paper on Artificial Intelligence. An European Approach to Excellence and Trust.
Mendorong perusahaan rintisan digital, kompetisi robot, teknologi di bidang kesehatan,
energi, keuangan dan agribisnis.



Aspek Legal AI di Indonesia



Perizinan

- KBLI 2020, yakni nomor 62021 dan nomor 62015
- Peraturan Pemerintah N o. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 5 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat



Kepatuhan dan Pengawasan



Mempunyai kebijakan internal mengenai data dan etika, mempublikasikan inovasi dan teknologinya, menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, mempunyai SDM yang paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki standar SKKNI, yang disyaratkan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 299 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Bertubung dengan Itu (YBD) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub-Bidang Data Science (Programmer, Manager, UI/UX, Legal).

- Lihat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi dan Sistem dan Transaksi Elektronik.



Pelindungan Data Pribadi

- UU No. 27 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2019 dan Perkominfo No. 20 Tahun 2016.



Kepatuhan Keamanan Siber

- Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.



Partisipasi dalam Strategi Nasional

- Mendukung pengembangan kecerdasan artifisial di sektor prioritas, seperti sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas.



Venture Capital Tech Law

55,5-61,5 Triliun Rupiah

● Investasi Venture Capital ke Startup Indonesia. (Tracxn & Daily Social, 2022)





Perusahaan Modal Ventura



PMV Lisensi OJK berdasarkan POJK 34-36 Tahun 2015

- Perseroan terbatas, koperasi atau perseroan komanditer memenuhi kualifikasi sebagaimana yang tertuang dalam POJK 34-36 Tahun 2015. Melakukan investasi penyertaan saham (equity participation) pada startup yang diawasi oleh OJK serta berhak mengeluarkan produk Dana Ventura.



Perusahaan Penanaman Modal Asing (UU No. 25 Tahun 2007 dan melalui BKPM)

- Perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perizinan diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga bisa berinvestasi pada startup.



Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham)

- Entitas perusahaan yang bisa melakukan investasi terhadap pasangan usaha lain, atas nama Perseroan Terbatas dengan perjanjian investasi berbasis pada ikatan kepercayaan. Mendirikan sebuah perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bisa melakukan investasi pada startup.



Investasi langsung (direct investment)

- Instrumen pendanaan langsung di capai dilakukan dari dana-dana (funds) yang dikelola oleh VC Asing untuk disalurkan terhadap startup Indonesia.



Membentuk perusahaan holding di Singapore

- Sebagian besar startup besar yang harus menggeser kantor pusatnya ke Singapore, untuk dapat melakukan kontrak investasi dengan pemodal asing. Membentuk perusahaan dengan kantor di Singapore ini dilakukan sebagai permintaan dari para pemodal startup besar ini dan dipandang sebagai kebutuhan pasar (market demand) dari pola investasi startup.